

# Sepak Bola Indonesia dalam Bingkai Pemberitaan Media

Afdal Makkuraga Putra

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta

Alamat, Jl. Meruya Selatan No 1 Kembangan Jakarta Barat.

Telp: 0215840816 Fax: 0215870341, e-mail: afdal.makkuraga@yahoo.com.

## ***Abstract***

*Since early 2010 up to now the national football discourse has been increasing. One of the reasons is that there was a 'chaotic' in the Indonesia football Association (PSSI), the leading Indonesia football association recognized by Federal International Football Association (FIFA) and the government of Indonesia. The research method used were framing analysis and social semiotics; whereas the object of study included news about Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) and Liga Primer Indonesia (LPI) covered in three national newspapers: Kompas, Suara Karya and Jurnal Nasional. The results of the study show that Kompas interpreted KSN as an arena to find some solutions instead of using the moment for replacing Nurdin Halid; and urged KSN to become the extraordinary congress (KLB) of PSSI. While Suara Karya, a newspaper belongs to GOLKAR party, focused more on the issue of Nurdin Halid replacement than informing the essence of the congress. The statement of Bill Covack that said the journalists should make the news comprehensive and proportional, was not proven.*

## **Abstrak**

Wacana sepak bola nasional sejak awal tahun 2010 menunjukkan fenomena yang terus meningkat. Salah satu penyebabnya adalah konflik di tubuh Persatuan Sepak Bola Indonesia, Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberitaan Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) dan Liga Primer Indonesia (LPI) di tiga surat kabar nasional yakni; Kompas, Suara Karya, dan Jurnal Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis *framing* dan semiotika sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harian Kompas memaknai KSN yang sejatinya adalah kongres untuk mencari solusi atas terpuruknya sepak bola nasional dimaknai Kompas sebagai momentum yang tepat guna mengganti Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. KSN pun didorong untuk menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Menurut Statuta PSSI, KLB baru bisa diselenggarakan apabila sudah memperoleh rekomendasi dua per tiga suara dari pemilik suara PSSI yang jumlahnya mencapai 78 klub. Menurut Suara Karya, surat kabar kepanjangan tangan Partai Golkar, lebih sibuk memberitakan isu-isu pelengseran Nurdin Halid dari Ketua Umum PSSI dibanding memberitakan esensi kongres tersebut. Menurut Bill Covack bahwa jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional, tidak terbukti.

**Kata kunci:** semiotik, *framing* dan *soft copy*

## Pendahuluan

Sepak bola adalah pembangkit semangat, alat rekonsiliasi bahkan kebudayaan. Di sejumlah negara, sepak bola adalah spirit bangsa. Argentina misalnya adalah contoh menarik. Negara di benua Amerika itu didera krisis ekonomi berkepanjangan sejak 1997. Negara itu seperti Indonesia menjadi pasien *International Monetary Fund* (IMF). Parahnya, Argentina hampir terjerumus dalam kebangkrutan. Namun satu hal yang tidak pernah surut dari negeri yang pernah mengalami diktator militer seperti Indonesia adalah spirit bermain sepak bola. Negara itu sukses melewati krisis ekonomi tanpa krisis prestasi sepak bolanya. Argentina tidak pernah kehabisan pemain sepak bola bertalenta tinggi. Sampai saat ini Argentina bersama Brazil adalah pengeksport pemain sepak bola terbanyak di dunia. Kedua negara itu rata-rata mengeksport 2000 pemain tiap tahun. Pemain-pemain itu bertebaran diseluruh pelosok dunia dan menjadikan tim yang dibelanya menjuarai kompetisi di semua level. Negara itu melihat sepak bola spirit untuk keluar dari kemiskinan.

Prestasi sepak bola Indonesia sekarang ini, bisa dibilang sangat menyedihkan. Keterpurukan seakan menenggelamkan prestasi yang pernah diraih. Padahal, Indonesia pernah memiliki prestasi lumayan dan cukup disegani di kawasan ASEAN. Karenanya tak ada salahnya bila Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) berkaca pada masa lalu.

Sebagai contoh hasil di SEA Games, Laos 2009 menjadi bukti. Indonesia, yang dulu pernah menjadi kekuatan sepak bola Asia Tenggara, tak berdaya pada pesta olahraga tersebut. Melawan Laos, yang tidak punya tradisi sepak bola, Indonesia kalah 0-2. Hasil ini sangat menyakitkan, karena sepanjang sejarah SEA Games, Indonesia tak pernah kalah dari Laos.

Persoalan lain yang juga ikut mendera yakni kerusuhan antar suporter. Pemicunya cukup kompleks, mulai dari fanatisme berlebihan kepada klub, soal wasit, kinerja panitia pertandingan, hingga minimnya sarana ekspresi suporter.

Segenap hiruk pikuk sepak bola selalu menjadi perhatian utama media massa. Semua pertandingan sepak bola mulai dari level antar-kampung sampai Piala Dunia selalu menjadi liputan

media massa. Memang tidak bisa disangsikan olah raga ini merupakan olah raga paling populer dan menyedot perhatian seluruh warga.

Akibatnya setiap media massa berusaha menghadirkan berita-berita seputar dunia sepak bola semenarik mungkin. Meskipun media bersangkutan harus mengeluarkan uang jutaan dolar Amerika. Berita-berita sepak bola pun tidak hanya didominasi oleh hasil pertandingan, tetapi juga informasi kehidupan sang pemain di luar lapangan hijau.

Selama tahun 2010-2011 terdapat dua peristiwa sepak bola yang menyita perhatian media massa yakni Kongres Sepak Bola Nasional yang dilaksanakan pada 29-30 Maret 2010 dan Liga Primer Indonesia yang mulai bergulir 8 Januari 2011.

Perhatian media cetak ibu kota (Kompas, Suara Karya dan Jurnal Nasional) terhadap dua peristiwa ini cukup serius. Masing-masing surat kabar seolah-olah berlomba memberitakan setiap kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan KSN dan LPI. Karena masing-masing surat kabar berbeda ideologi, orientasi dan pemilik, maka masing-masing surat kabar memiliki sikap dan pandangan yang berbeda atas peristiwa tersebut, meskipun realitasnya sama.

Suatu realitas yang dituliskan dalam berita diharapkan mampu memberikan informasi yang layak dan memadai kepada publik dengan tetap memegang prinsip objektivitas, kejujuran, keadilan dan keberimbangan serta tentu saja kepatutan. Namun menurut pendekatan konstruksionis, sebuah teks berupa berita tidak bisa kita samakan seperti sebuah *copy* dari realitas. Berita adalah rekonstruksi tertulis dari apa yang terjadi. Karenanya, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi sangat berbeda satu sama lain (Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi, No 5. Oktober 2000).

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger. Menurutnya, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi, sebaliknya ia dibentuk dan dikonstruksi. Setiap orang bisa memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi,

pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing (Alex Sobur, 2001).

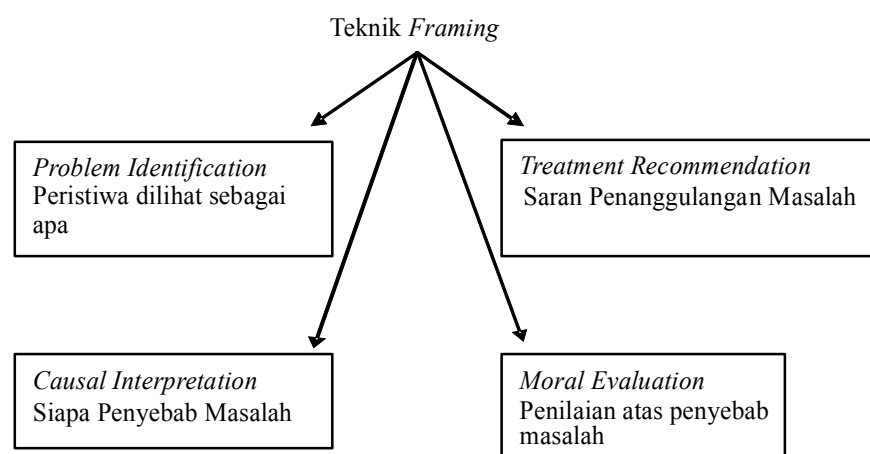
Menurut Ann N. Crigler ada dua pandangan besar dalam studi media dan komunikasi, yaitu pandangan efek media dan pendekatan konstruksionis. Sedangkan John Fiske menyebut dua pandangan besar dalam studi komunikasi, yaitu; pendekatan proses dan pendekatan semiotik. Meskipun mempunyai istilah yang berbeda, pengertian yang ditunjuk sama. Apa yang disebut Crigler sebagai pandangan efek media, atau oleh John Fiske disebut sebagai pendekatan proses, mempunyai pengertian sebangun dengan pendekatan positivis. Sedang, apa yang disebut Fiske sebagai pendekatan semiotik, sebangun pengertiannya dengan pendekatan konstruksionis (Sobur, 2001).

Dalam konteks itulah kemudian menurut Nimmo (1993) bahwa media memiliki empat fungsi yaitu pertama, *collection and presentation of objective information*, di sini media bertindak mengumpulkan fakta dari peristiwa yang terjadi di sekelilingnya dan menyajikannya ke publik. Tetapi yang penting ditekankan bahwa dalam melakukan fungsi tersebut wartawan hendaknya bersikap *impartiality* dan sedikit mungkin bias; kedua *to interpret the news*, di sini media berperan sebagai *interpreter* terhadap suatu peristiwa yang diliputnya. Ia menjelaskan ke publik penyebab dan implikasi dari peristiwa itu sehingga publik yang tidak terbiasa dengan cara bekerja-

nya pemerintah dapat memahami tentang relevansi fakta yang mereka baca. Sebagian pakar menerima fungsi interpretasi mirip konsep *advocacy journalism*. *Advocacy* adalah suatu bentuk interpretasi yang di dalamnya mampu menjelaskan arti suatu fakta (*interpretation*) terhadap sudut pandang tertentu; ketiga *responsibility of the press in a democracy*, artinya memberi tugas kepada media massa agar lebih *representative* atau mewakili publik di dalam melawan pemerintah. *Responsibility*, di sini media dituntut bertanggung jawab untuk menentukan *opini public* dan *to inform the public and the government* tentang iklim suatu informasi (*the climate of opinion*). Fungsi keempat ini dianggap sebagai fungsi yang khusus dari media massa yang mampu menciptakan apa yang disebut *a mass society*; keempat *partisipant*, artinya bagaimana reporter melihat dirinya sendiri sebagai partisipan di dalam proses pemerintahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana media massa mbingkai berita Kongres Sepak Bola Nasional dan Wacana Liga Primer Indonesia di tiga surat kabar ibu kota. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bingkai pemberitaan sepak bola (kasus KSN dan LPI) di media massa selama kurung waktu 2010-2011.

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan mengelaborasi keberlakuan teori-teori wacana atas dunia sepak bola di media massa, sehingga penelitian ini dapat melahirkan rekomendasi kepada segenap *stakeholder*



Gambar 1. Skema *Framing* Robert Entman

sepak bola sehingga dapat menyusun kebijakan dan tindakan yang dapat memperkuat sepak bola di Indonesia

### Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode *framing* Robert Entman dan semiotika sosial Halliday dan Hassan. Entman dalam membingkai berita dilakukan dengan empat cara, yakni: pertama, pada identifikasi masalah (*problem identification*) yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (*moral evaluation*) yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya (Sobur, 2001). Gambar 1 adalah model Entman (Sobur, 2001).

Sesuai dengan paradigma kritis, analisa semiotik bersifat kualitatif. Jenis penelitian ini memberi peluang yang besar bagi dibuatnya interpretasi-interpretasi alternatif. Dalam penerapannya metode semiotik ini menghendaki pengamatan secara menyeluruh dari semua isi berita (teks), termasuk pemberitaan (*frame*) maupun istilah-istilah yang dipergunakannya. Peneliti diminta untuk memperhatikan koherensi makna antarbagian dalam teks itu dan koherensi teks dalam konteksnya. Karena itu dalam penelitian semiotika sosial, analisis dilakukan terhadap semua isi berita, termasuk judul, sub judul, istilah-istilah dan cara pemberitaan yang digunakan media yang dijadikan sampel.

Sesuai dengan perspektif semiotika sosial, dengan menggunakan kerangka pemikiran Halliday dan Hassan maka tiga unsur yang menjadi pusat penafsiran teks secara kontekstual yaitu pertama, medan wacana (*field of discourse*) yang menunjuk pada hal yang terjadi, apa yang dijadikan wacana oleh pelaku (media massa) mengenai sesuatu yang terjadi di lapangan peristiwa; kedua, pelibat wacana (*tenor of discourse*) menunjuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks (berita); sifat orang-orang itu, kedudukan dan pe-

ranan mereka. Dengan kata lain, siapa saja yang dikutip dan bagaimana sumber itu digambarkan sifatnya; ketiga, sarana wacana (*mode of discourse*) menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa; bagaimana media massa menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan media (situasi) dan pelibat orang-orang yang dikutip; apakah menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik, eufimistik atau vulgar (Sobur, 2001: 148).

Penulis sengaja memakai dua model analisis, alasannya adalah untuk mengisi kelemahan masing-masing model. Kelemahan model analisis Robert Entman misalnya tidak membahas tentang aspek-aspek linguistik seperti pelibat wacana (orang-orang yang dikutip pernyataannya dalam teks) dan sarana wacana (gaya bahasa yang digunakan oleh media dalam menggambarkan realitas). Segenap kelemahan ini ditutupi oleh analisis semiotika sosial Hassan dan Halliday, sehingga temuan penelitian ini diharapkan lebih komprehensif.

Objek penelitian dalam studi adalah tiga surat kabar yang terbit di Jakarta yakni Kompas, Suara Karya dan Jurnal Nasional. Ketiga media itu dipilih karena dibentuk atas dasar kepentingan partai politik. Pada awal pendiriannya, Kompas menyuarakan Partai Katolik Indonesia (partai politik peserta pemilihan umum tahun 1955), Suara Karya menyuarakan aspirasi partai Golkar dan Jurnal Nasional menyuarakan kepentingan Partai Demokrat, sebagai partai pemenang Pemilu 2009. Adapun periodisasi kajian yakni Kongres Sepak Bola Nasional diambil dari tanggal 26 Maret sampai dengan 4 April 2010. Sedangkan Liga Primer Indonesia periode kajian mulai dari 30 Desember 2010 sampai dengan 11 Januari 2011.

Sedangkan Obyek kajian yang akan dianalisis meliputi dua peristiwa besar yakni; pertama, Kongres Sepakbola Nasional. Peristiwa ini sering disebut sebagai gerakan *people power* yang mencari solusi atas keterpurukan yang dialami PSSI saat ini. Acara yang berlangsung 29 sampai dengan 30 Maret 2010 dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua, bergulirnya Liga Primer Indonesia (LPI) yang digagas oleh pengusaha nasional, Arifin Panigoro. Ide ini pertamakali muncul sekitar bulan Septem-

ber 2010 dan *kick off* pertama sejak 8 Januari 2011. Liga ini merupakan tandingan dari Liga Super Indonesia (LSI).

Perbedaan antara kompetisi yang digelar PSSI saat ini (Liga Super dan Liga Indonesia) dengan LPI adalah kedudukan penyelenggara kompetisi sejajar dengan federasi sepak bola. Perbedaan lainnya, LPI dan kompetisi di tiga negara tadi dimiliki oleh pesertanya sehingga seluruh keuntungan yang didapat dari kompetisi itu dikembalikan ke peserta. Dalam kompetisi di Indonesia, klub tidak mendapatkan keuntungan finansial apa pun dengan mengikuti kompetisi tersebut kecuali hanya mendapat subsidi dalam jumlah kecil dari dana sponsor.

LPI dicetuskan juga untuk menghentikan kebiasaan klub menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, klub sangat bergantung kepada APBD, yang merupakan uang rakyat. Jika tidak dapat kucuran APBD, mereka tidak bisa berbuat apa-apa seperti yang dialami Persitara Jakarta (kompas.com, 17 September 2010).

Namun, keberadaan LPI ditolak oleh induk organisasi sepak bola Indonesia, PSSI. Lewat ketua umum PSSI, Nurdin Halid, menyatakan bahwa PSSI tidak merestui LPI. Kompetisi resmi sepak bola di Indonesia hanya LSI, Piala Copa dan Liga Amatir yang terbagi dalam Divisi Utama, Divisi I, II dan III (kompas.com, 4 November 2010).

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan model Robert Entman, Kompas mengidentifikasi masalah Kongres Sepak Bola Indonesia berusaha menggiring opini untuk menentang PSSI dan atau Nurdin Halid. Porsi kutipan yang kontra terhadap PSSI lebih menonjol dibanding yang mendukung PSSI. Kutipan kalimat yang dipergunakan Kompas juga terlihat memilih kalimat-kalimat yang bernada negatif dan sinis terhadap PSSI dan atau Nurdin Halid. Simpul masalah (*causal evaluation*) adalah kepemimpinan ketua umum PSSI yang tidak kredibel. Keberadaan Ketua Umum PSSI melanggar statuta FIFA yang melarang mantan narapidana menjadi ketua asosiasi sepak bola. Oleh Karena itu rekomendasi yang

diusulkan Kompas yakni reformasi dan strukturisasi PSSI, turunkan Nurdin Halid dari Ketua Umum PSSI. Pemberitaan Kompas berikut ini menunjukkan hal tersebut.

KSN digelar atas gagasan Presiden yang miris atas terpuruknya sepak bola nasional. Di bawah Ketua Umum PSSI Nurdin Halid, timnas Indonesia gagal ke Piala Asia pertama kali setelah selalu lolos sejak 1996, timnas U-23 juru kunci penyisihan grup SEA Games 2009, dan timnas U-19 gagal ke Piala Asia U-19 pada laga kualifikasi di kandang (Kompas, 28 Maret 2010, judul berita; Sepak Bola Nasional; Warga Malang Kibarkan Merah Putih Empat Hari).

Mengkritik kepengurusan PSSI yang memanipulasi Statuta FIFA demi melanggengkan kepemimpinan PSSI saat ini. Ia juga menyoroti latar belakang Nurdin sebagai bekas terpidana kasus korupsi, yang disebutkan tidak boleh menjabat kepengurusan PSSI jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Kongres Sepak Bola Nasional; Menguat, Desakan agar Nurdin Mundur, Rabu 31 Maret 2011).

Harian Suara Karya memiliki pandangan yang berbeda dengan Kompas. Surat kabar Partai Golkar ini memaknai peristiwa KSN. Acara KSN bukan untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid, namun lebih dimaknai sebagai bentuk peran serta pemerintah. Oleh karena itu, Suara Karya lebih menggiring opini bahwa keterpurukan prestasi PSSI bukan semata kegagalan organisasi tersebut tetapi kesalahan pemerintah yang kurang memberikan dana yang memadai.

Suara-suara yang meminta Nurdin Halid mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum PSSI selalu ditepis. Surat kabar ini selalu memberikan ruang bagi narasumber yang menolak Nurdin mundur oleh karena itu simpul masalah (*causal evaluation*) keterpurukan PSSI tak lain karena salah pemerintah yang kurang mendukung secara finansial dan fasilitas. Di mata Suara Karya dukungan pemerintah selalu dimaknai dengan dana dan fasilitas. Bahkan bantuan yang selama ini diterima dianggap kecil dan tidak memadai. Seruan moral surat kabar ini, KSN sebagai momen-



tum untuk memecahkan masalah prestasi persepakbolaan di tanah air. Acara KSN pada hari-an Suara Karya bukan untuk mengganti Ketua Umum PSSI, tapi menjadi sarana dalam upaya mencari solusi untuk pembinaan sepak bola yang lebih baik ke depan, sehingga Indonesia bisa kembali berprestasi dalam sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan rekomendasinya yakni mengusulkan agar peran pemerintah lebih diperdalam terutama mengenai dana dan fasilitas seperti stadion dan pembinaan. Di bawah ini kutipannya;

Kita harus menyambut baik ‘campur tangan’ pemerintah itu. Tetapi, akan menjadi percuma saja jika tidak diikuti bantuan dana yang besar untuk menjalankan program secara konsisten, termasuk penyediaan sarana dan prasarana di berbagai daerah yang selama ini boleh dibilang kurang memenuhi persyaratan,” ujarnya (Suara Karya, judul berita, Nurdin Halid; KSN Tak Bisa Intervensi PSSI, 17 Maret 2010).

Sebagian besar dari Pengprov PSSI mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur olahraga khususnya sepak bola dan pendanaan bagi pembinaan olahraga. “Buruknya prestasi sepak bola kita tidak bisa hanya ditumpahkan kepada PSSI saja. Peran pemerintah harus dominan, berkewajiban untuk membina se-pak bola, olahraga yang sangat digandrungi rakyat, dan memiliki magnet dalam berbagai dimensi yang luar biasa (Suara Karya, judul berita; Membangun Sepak Bola Indonesia: Peran Pemerintah Bakal Jadi Sorotan di KSN, 29 Maret 2010).

Bila Kompas dan Suara Karya mengambil sikap yang pro-kontra, justru Jurnal Nasional terlihat sangat berhati-hati dan menahan diri untuk tidak larut dalam polemik pro-kontra PSSI. Surat kabar yang menjadi corong pemerintahan SBY ini menggambarkan KSN sebagai ajang yang mencuatkan harapan dalam membenahi seluruh kelumpuhan sepak nasional. Selain itu diharapkan dapat menemukan solusi membenahi kemelut organisasi PSSI dan cara agar prestasi Timnas bersinar di kancah internasional. Surat kabar ini juga tidak terlalu tegas menyebut penyebab masalah di tubuh PSSI. Meskipun menyinggung per-

soalan statuta PSSI bermasalah tetapi peran pemerintah tidak disebut sama sekali. Oleh karena itu rekomendasi yang diusulkan oleh surat kabar ini adalah mendorong segenap pemangku kepentingan berkomitmen menjalankan rekomendasi KSN. Bila PSSI tidak segera melaksanakannya maka pemerintah harus segera mengambil alih. Surat kabar ini juga mendorong adanya perubahan, meskipun tidak jelas perubahan apa yang dimaksud, seperti terlihat pada kutipan berikut ini; ...Asisten Pelatih Persib, Yusuf Bahtiar berharap KSN tersebut bisa melahirkan rekomendasi untuk memperbaiki sistem dan regulasi sepak bola nasional. “KSN itu harus melahirkan sebuah solusi untuk memperbaiki segala hal demi kemajuan sepak bola Indonesia, salah satunya memperbaiki prestasi Timnas, juga memperbaiki hal lainnya demi kemajuan sepak bola di Indonesia,” ujarnya. (Jurnal Nasional, judul berita; Mereka Berharap KSN Berhasil, 29 Maret 2010)

Pada kasus Liga Primer Indonesia, sikap Kompas sama dengan pada peristiwa KSN. Surat kabar ini tetap konsisten kontra PSSI dan mendukung LPI. Medan wacana Kompas atas LPI adalah kompetisi alternatif guna mengangkat prestasi sepak bola Indonesia yang sejak kepemimpinan Nurdin Halid tidak pernah meraih prestasi internasional. Menurut Kompas, PSSI harusnya bertindak arif dengan mengakomodasi LPI. Mengancam-ancam LPI justru menunjukkan sikap arogansi PSSI. Bahkan, tindakan mengancam LPI membawa dunia sepak bola makin buruk, seperti tampak pada kutipan berikut;

Sepak bola Indonesia kembali mengalami masa-masa kelam akibat perseteruan antara PSSI dan pengelola LPI. Sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja PSSI—yang selama delapan tahun masa kepengurusan Nurdin Halid tidak menghasilkan prestasi di tingkat internasional—kompetisi yang digagas oleh pengusaha Arifin Panigoro seharusnya disikapi wajar-wajar saja, tanpa perlu memberi muatan-muatan politik, apalagi syak wasangka picik (Kompas, judul berita; Bencana Sepak Bola Nasional, 6 Januari 2011).

Untuk mendukung medan wacananya, Kompas memberikan porsi yang besar terhadap narasumber yang menerima LPI, sebaliknya mem-

Tabel 1. Analisis *Framing* Robot Eantman Kasus KSN

| Perangkat <i>Framing</i>        | Kompas   | Jurnal Nasional   | Suara Karya  |
|---------------------------------|--|---|--|
| <i>Problem identification</i>   | Dalam tujuh tahun terakhir, publik nasional disuguhi wajah sepak bola yang buram penuh kegetiran. Timnas tanpa prestasi, kompetisi sering rusuh dan dibumbui aroma tak sedap berwujud suap, manajemen PSSI yang kusut, serta infrastruktur stadion dan lapangan-lapangan sepak bola buruk. | KSN digambarkan sebagai ajang yang mencuatkan harapan dalam membenahi seluruh kelumpuhan sepak nasional. Di samping itu untuk menemukan solusi membenahi kemelut organisasi PSSI; menemukan cara agar prestasi Timnas bersinar di kancah internasional. | KSN adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masalah sepak nasional. KSN bukan ajang untuk mengganti Ketua PSSI Nurdin Halid.      |
| <i>Causal Evaluation</i>        | Simpul dari semua masalah adalah kepemimpinan ketua umum PSSI yang tidak kredibel. Keberadaan Ketua Umum PSSI melanggar statuta FIFA yang melarang mantan narapidana menjadi ketua asosiasi sepak bola.  | Bahasa santun, optimis dan optimis<br>Tidak tegas menyebutkan penyebab masalah. Meskipun menyebut persoalan statuta PSSI bermasalah. Peran pemerintah tidak disebut sama sekali   | Rendahnya prestasi sepak bola karena pemerintah kurang memberikan dana dan kurang membangun fasilitas sepak bola serta minim pembinaan |
| <i>Moral Evaluation</i>         | Jangan hanya kongres-kongresan, kita butuh perubahan.<br><br>Kongres ini untuk memperbaiki persepakbolaan kita yang terus terpuruk   | KSN adalah kongres kebudayaan.<br><br>Sepak Bola adalah etalase perubahan dan peradaban bangsa.<br><br>KSN menjadi momentum strategis untuk membangkitkan kembali kesadaran kolektif kultural kita sebagai bangsa yang sportif dan beradab              | KSN adalah upaya menyatukan semua elemen untuk mencari solusi untuk memajukan sepak bola   |
| <i>Treatment recommendation</i> | Reformasi dan strukturalisasi PSSI.<br><br>Turunkan Nurdin Halid dari Ketua PSSI.  | Semua pihak harus jalankan hasil KSN. Bila PSSI lamban, pemerintah harus mengambil alih.  | Perkuat dukungan dana dari pemerintah.<br><br>Jangan ganti ketua umum PSSI   |

berikan ruang yang terbatas bagi narasumber yang menolak LPI. Narasumber yang dikutip Kompas umumnya berasal dari klub atau pelatih atau pemain yang berkiprah di LPI dan pemerintah (eksekutif). Dalam mendukung medan wacana, Kompas senantiasa memberikan porsi kutipan yang lebih banyak kepada klub peserta LPI (pelibat wacana).

Sarana wacana dari narasumber yang dikutip Kompas umumnya menggunakan gaya bahasa yang *emunarasio*, yaitu beberapa peristiwa yang membentuk satu kesatuan, dilukiskan satu persatu agar tiap peristiwa dalam keselu-

ruhnya tampak dengan jelas. Dalam melakukan penolakan terhadap sikap PSSI, bahasa narasumber digambarkan dengan cara *kontradiksi in terminis*, yaitu gaya bahasa yang memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya. Meskipun kontradiksi, bahasa tersebut tetap sopan dan memenuhi kaidah berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, seperti terlihat pada kutipan berikut ini;

Selain itu, PSSI juga mengancam akan memberikan sanksi kepada klub dan personel PSSI yang terlibat dengan LPI ... Erwin juga menyayangkan sikap PSSI tentang tertutup-

**Tabel 2. Daftar Narasumber Kompas yang Pro LPI dan Kontra LPI**

| Pro LPI                                   | Kontra LPI                                      |
|---|---|
| Andi A Mallarangeng (Menegpora)           | Andi Darussalam Tabussala (Manajer Timnas PSSI) |
| Hadi Rudayatmo (Persis Solo)              | Nugraha Basoes, (Sekjen PSSI)                   |
| Edward Aritonang (Kapolda Jateng)         | Joko Driyono (PT. Liga Indonesia)               |
| Fauzi Bowo (Gubernur DKI)                 | Imam Arif (Ketua BTN)                           |
| Abi Hasanto (Jubir LPI)                   |   |
| Erwin Aksa Mahmud (Pengusaha Sponsor PSM) |   |
| Ilham Arief Sirajudin (Ketua PSM)         |   |
| Aji Santoso (Pelatih Persebaya)           |   |
| Darwis Dunda (Persebaya Surabaya)         |   |
| Sartono Anwar (Pelatih Persibo)           |   |
| Ismail Mukadar (Manajer Persebaya)        |   |
| Timo Scheuunemann (Pelatih Persema)       |   |
| Nandar Iskandar (Pelatih Bandung FC)      |   |
| Tamrin Amal Tamagola (Akademisi UI)       |   |

nya peluang bagi pemain yang berlaga di LPI untuk masuk timnas. “Saya sadar, soal timnas merupakan otoritas PSSI. Namun, sebaiknya semua pihak berpikir rasional dan bersinergi untuk membangun sistem persepakbolaan nasional yang sehat,” ujarnya (LPI Menyampaikan “Fee” untuk PSSI, 4 Januari 2011).

Harian Suara Karya berusaha membangun medan wacana atas peristiwa LPI sebagai liga yang ilegal. Disebut ilegal karena liga tersebut tidak digelar oleh PSSI atau asosiasi yang bernaung dibawah FIFA. Selain itu LPI juga dianggap merugikan pemain dan klub. Merugikan pemain karena FIFA hanya mengakui pemain yang berlaga di kompetisi yang dikelola oleh anggota FIFA. Hal tersebut dapat merugikan klub, karena klub yang meninggalkan atau tidak meneruskan kompetisi ISL otomatis klub tersebut terdegradasi ke Divisi Utama. Kutipan berikut ini menegaskan hal tersebut;

... Otoritas sepak bola dunia itu mengancam akan menjatuhkan sanksi jika kompetisi itu jadi digelar, Sabtu (8/1) Ini. Jika sanksi itu ter-

laksana, tentu ini akan merugikan sepak bola Indonesia.

“Kami belum menerima apa pun yang resmi tentang hal ini (LPI—Red), yang kompetisi liganya akan mulai dimainkan besok (hari ini—Red). Kami memantau kondisi ini dan jika terus berjalan, itu akan berhadapan dengan Komite FIFA dan sanksi akan dijatuhkan,” kata Direktur Pengembangan Anggota Asosiasi FIFA Thierry Regenass, Jumat (7/1). (Suara Karya, judul berita; LPI Dihantui Ancaman Sanksi FIFA, Sabtu, 8 Januari 2011).

Sebagai salah satu pemain Persema, Irfan pun termasuk salah satu yang terancam dihukum. Karimnya di timnas kemungkinan akan berakhir jika pemain blasteran Indonesia-Belanda itu benar-benar mengikuti jejak Persema ke LPI.

“Kita sudah bicara dengan agennya yang juga adalah kakak Irfan, Fachri Bachdim, mengenai risiko jika ia masih bermain di Persema dia akan menuai sanksi dari PSSI. Jika Irfan mencintai timnas dan ingin bermain, dia tahu

**Tabel 3. Daftar Narasumber Suara Karya yang Kontra dan Pro LPI**

| Kontra LPI                              | Pro LPI                     |
|---|-----------------------------|
| Nirwan Dernawan Bakrie (Wkl Ketua PSSI) | Fauzi Bowo (Gubernur DKI)   |
| Max Boboy (PSSI)                        | Andi Mallarangeng (Menpora) |
| Andi Darussalam Tabussala (PSSI)        | Anton Bahrul Alam (Polri)   |
| Nugraha Basoes (Sekjen PSSI)            | Edi Wibowo (Polri)          |
| Icuk Sugiarto (IANI)                    | Gordon Mogot (Ketua BOPI)   |
| Angelina Sondakh (Anggota DPR)          |                             |
| Zulfadli (Anggota DPR)                  |                             |
| Roy Saputra                             |                             |



harus ke mana,” ucap Ketua PT Liga Indonesia Andi Darussalam Tabusalla. (Suara Karya, judul berita; Irfan Bachdim: Soal Timnas Terserah PSSI, 3 Januari 2011).

Dalam rangka mendukung medan wacana yang dibuat, Suara Karya senantiasa menonjolkan kutipan yang mendukung PSSI dan menentang LPI. Narasumber tersebut adalah mereka yang umumnya dari PSSI sendiri, anggota DPR yang kontra LPI dan klub yang tidak bergabung dengan LPI (pelibat wacana). Mereka digambarkan seolah-olah mewakili seluruh kepentingan sepak bola nasional, seperti terdapat pada kutipan berikut.

Zulfadhli, menilai keberadaan LPI akan merusak tatanan kompetisi sepak bola yang sudah ada sebelumnya. Menurutnya, pemerintah harus jeli memandang persoalan ini. “Kompetisi sepak bola yang resmi kan sudah jelas ISL, yang diakui FIFA juga ISL, jadi jangan sampai kompetisi baru merusak yang sudah ada,” ujarnya.

Menurut Zul, LPI justru akan menyesatkan pemain sepak bola berbakat yang ada di In-

donesia. Sebab, mereka akan sulit berkembang dan terkungkung dalam satu kompetisi saja. “Kami kasihan pada nasib pemainnya nanti karena mereka tidak akan bisa ke mana-mana. Bahkan, untuk bermain di tim nasional saja pemain harus dari klub yang diakui FIFA. Jadi, untuk membela timnas suatu negara tetap ada aturannya,” ujar Zul (Suara Karya, judul berita; LPI Dihantui Ancaman Sanksi FIFA, 8 Januari 2011)

Sarana wacana yang dipakai oleh Suara Karya pada umumnya bersifat okupasi dan sinisme. Okupasi adalah gaya bahasa yang menyatakan bantahan atau keberatan terhadap sesuatu yang oleh orang banyak dianggap benar sedangkan sinisme adalah gaya bahasa sindiran yang menjurus kasar. Contoh gaya bahasa okupasi ada pada kutipan berikut;

PSSI memang bersikeras tak akan pernah mengakui Liga Primer Indonesia (LPI) sebagai kompetisi yang sah. Malah organisasi sepak bola tertinggi di Tanah Air itu menganggap LPI banci. Hal itu ditegaskan oleh Sekjen PSSI

**Tabel 4. Daftar Narasumber Jurnal Nasional yang Pro dan Kontra LPI**

| Pro LPI                                   | Kontra LPI                            |
|---|---------------------------------------|
| Andi Mallarangeng (Menpora)               | Andi Darussalam Tabussala (Ketua BTN) |
| Joko Widodo                               | Imam Arif (manajer Timnas U23)        |
| Anton Bachrul Alam (Polri)                | Max Boboy (Pengurus PSSI)             |
| Ito Sumardi (Polri)                       | Nugraha Basoes (Sekjen PSSI)          |
| Neta S Pane ( <i>Police Watch</i> )       | Sutan Harhara (Mantan Pemain)         |
| Ilham Arief Sirajudin (Walikota Makassar) |                                       |
| Hendra Sirajudin (PSM Makassar)           |                                       |
| Nurmal Idrus (PSM)                        |                                       |
| Kim Kurniawan (Pemain Persema)            |                                       |
| Hadi Basalama (Pengurus Persija)          |                                       |
| Sartono Anwar                             |                                       |
| Timo Scheunemann (Pelatih Persema)        |                                       |
| Arya Abhiseka                             |                                       |
| Irfan Bachdim (Pemain Persema)            |                                       |
| Arya Abhiseka (LPI)                       |                                       |
| Husein Abdullah (PSM)                     |                                       |
| Gordon Mogot (BOPI)                       |                                       |
| Doedie Gambiro,                           |                                       |
| Saleh Ismail Mukadar (Persebaya)          |                                       |
| Alief Sjachviar,                          |                                       |
| Asmuri                                    |                                       |
| Llano Mahardika                           |                                       |
| Syahrullah Alwi Fauzi                     |                                       |
| Kesit B Handoyo (Pengamat Bola)           |                                       |
| Ano Suparno                               |                                       |

**Tabel 5. Analisis Semiotika Sosial Kasus LPI**

| Surat Kabar     | Medan Wacana  | Pelibat Wacana  | Sarana Wacana                               |
|-----------------|---|---|---|
| Kompas          | LPI ilegal, merugikan klub, pemain dan seluruh elemen sepak bola.   | Menonjolkan narasumber yang kontra LPI, seperti misalnya pengurus PSSI                                    | Menggunakan gaya bahasa okupasi dan sinisme |
| Jurnal Nasional | LPI terobosan untuk membangkitkan sepak bola nasional. LPI harus disambut dan didukung. Pihak yang menolak LPI, bodoh dan bergaya Orde Baru | Umumnya mengutip pendapat pengurus klub, pemain, eksekutif yang pro LPI. Menegasikan mereka yang pro PSSI | Sinisme dan Okupasi                         |
| Suara Karya     | LPI ilegal, merugikan klub, pemain dan seluruh elemen sepak bola.   | Menonjolkan narasumber yang kontra LPI, seperti misalnya pengurus PSSI                                    | Menggunakan gaya bahasa okupasi dan sinisme |

Nugraha Besoes dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Kamis (30/12), terkait surat yang dikirim oleh pihak LPI kepada PSSI per tanggal 22 Desember kemarin. (Suara Karya, judul berita; Tiga Klub ISL Terdegradasi, 31 Desember 2010).

Sementara itu, medan wacana yang dibangun oleh Jurnal Nasional adalah LPI sebagai terobosan untuk memajukan sepak bola nasional yang selama ini terpuruk di kancah internasional. PSSI seharusnya mengakomodasi LPI, bukan mengancam atau memberi sanksi kepada pemain atau klub, seperti pada kutipan berikut:

LPI harus dihargai sebagai sebuah terobosan untuk memajukan sepak bola nasional. Ia berharap PSSI sebagai induk organisasi bertindak sebagai seorang bapak yang mau memfasilitasi, bukan merasa tersaingi meski organisasi tersebut sudah memiliki Liga Super Indonesia (Jurnal Nasional, judul berita; LPI Harus Seimbangkan Posisi, 7 Januari 2011).

Pelibat Wacana yang dibentuk oleh Surat kabar yang menjadi corong Partai Demokrat ini cenderung menegasikan narasumber yang menolak LPI. Narasumber dari kategori eksekutif, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng yang paling sering dikutip. Adapun dari PSSI, nama Andi Darussalam Tabbusala dan Max

Boboy yang sering dikutip sedangkan dari Pelatih dan Pengurus Klub, nama Timo Scheunemenn (pelatih Persema) dan Saleh Ismail Mukadar (manajer Persebaya) yang paling dikutip.

Sarana Wacana yang dikembangkan oleh Jurnal Nasional sama seperti Suara Karya yakni okupasi dan sinisme. Jurnal Nasional menyindir PSSI bodoh, bobrok dan seperti Orde Baru, karena mendegradasi PSM dan mengancam klub dan pemain yang bermain di LPI. Hal tersebut tampak pada kutipan di bawah ini:

*Media Officer* PSM Nurmal Idrus mengatakan, keputusan PSSI mendegradasi PSM Makassar adalah hal yang bodoh. Seharusnya, PSSI menunggu manajemen baru untuk mengambil alih PSM. Tapi karena PSSI sudah mengeluarkan surat keputusan degradasi, maka calon manajemen baru tidak mungkin mengambil alih PSM (Jurnal Nasional, judul berita; PSSI Dianggap Bodoh Degradasikan PSM, 2 Januari 2011).

PSSI sekarang ini, kata mantan Ketua KONI Jatim, seperti neo orde baru. Karena model-model kepemimpinannya mirip sekali ketika negara ini dipimpin Presiden Soeharto yang selalu melakukan upaya *pressure*. Seperti ancaman-ancaman yang sering dilakukan terhadap klub. "Mereka-mereka yang tidak mau bergabung dengan LPI karena takut de-

ngan ancaman-ancaman dari PSSI,” kata Saleh (Jurnal Nasional, judul berita; PSSI Dianggap Neo Orde Baru, 7 Januari 2011).

## Simpulan

Temuan penelitian dari dua kasus yakni Kongres Sepak Bola Indonesia dan Liga Primer Indonesia menunjukkan bahwa masing-masing surat kabar memiliki pandangan sendiri-sendiri atas kasus tersebut. Media akhirnya tidak bisa terhindar antara pro dan kontra dalam memberitakan dua kasus tersebut.

Di sinilah kemudian pandangan kaum konstruktivis yang mengatakan bahwa berita adalah hasil konstruksi terbukti benar. KSN yang sejatinya adalah kongres untuk mencari solusi atas terpuruknya sepak bola nasional dimaknai Kompas sebagai momentum yang tepat guna mengganti Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. KSN pun didorong untuk menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Padahal sejatinya menurut Statuta PSSI, KLB baru bisa digelar apabila sudah memperoleh rekomendasi 2/3 suara dari pemilik suara PSSI yang jumlahnya mencapai 78 klub.

Sebaliknya Suara Karya, surat kabar kepanjangan tangan Partai Golkar, lebih sibuk meng-*counter* isu-isu pelengseran Nurdin Halid dari Ketua Umum PSSI dari pada memberitakan esensi kongres tersebut. Apa yang dikatakan oleh Bill Covack bahwa Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional, tidak terbukti.

Elemen komprehensif dan proporsional mengamanahkan agar jurnalis mencari sebanyak mungkin narasumber berita agar wacana kebenaran muncul ke permukaan. Hal yang terjadi adalah masing-masing surat kabar malas mencari narasumber di luar medan wacana yang dibangun. Akibatnya, muncul *angle* pemberitaan sempit dan hanya terjebak pro dan kontra.

Akibat sempitnya *angle* berita yang dimuat kemudian memunculkan dugaan bahwa pemberitaan masing-masing surat kabar tidak independen dan membawa kepentingan tersembunyi. Suara Karya, misalnya, kelihatan tidak independen saat memberitakan KSN, fakta bahwa eksistensi

Ketua umum PSSI, Nurdin Halid melanggar statuta FIFA tidak pernah diangkat. Fakta ini mudah dipahami bahwa Nurdin Halid adalah kader Partai Golkar. Dirinya dua kali terpilih menjadi anggota DPR dari Sulawesi Selatan mewakili Fraksi Partai Golkar.

Sebaliknya Jurnal Nasional juga tidak independen dalam menggambarkan fakta bahwa pemerintah kurang serius melakukan pembinaan sepak bola yang ditandai dengan minimnya pembenahan fasilitas stadion dan anggaran yang minim. Pengabaian fakta-fakta itu dapat diduga sengaja dilakukan oleh Jurnal Nasional, mengingat surat kabar ini adalah surat kabar yang menyuarakan aspirasi pemerintah. Istilahnya tidak mungkin surat kabar ini mengkritik atasan sendiri.

Atas segala fakta ketidakindependenan masing-masing surat kabar membenarkan pandangan kaum konstruktivis yang menilai bahwa etika, pilihan moral, dan keberpihakkan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita. Dalam pandangan konstruksionis, wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dia lihat. Etika dan moral yang dalam banyak hal berarti keberpihakkan pada satu kelompok atau nilai tertentu, umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu, adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas. Wartawan di sini bukan hanya pelapor, karena disadari atau tidak ia menjadi partisipan dari keragaman penafsiran dan subjektivitas dalam publik.

Meskipun masing-masing surat kabar mengambil sikap berbeda, atas persoalan KSN dan LPI namun sebaiknya pemberitaannya tetap obyektif dan berimbang serta mematuhi kaidah-kaidah Kode Etik Jurnalistik. Memang sulit dihindari untuk tetap bersikap pro dan kontra dalam memberitakan KSN dan LPI, namun hendaknya surat kabar Suara Karya dan Jurnal Nasional menghindari gaya bahasa sinisme (sindiran kasar). Dari sisi narasumber, sebaiknya masing-masing surat kabar, menghindari menggunakan narasumber yang berulang-ulang (seperti Saleh Ismail Mukadar dan Max Boboy) karena penggunaan narasumber yang berulang-ulang membuat berita kurang kredibel dan monoton.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penelitian sampai selesai terkhusus kepada pengelola portal [www.kemempora.go.id](http://www.kemempora.go.id) yang bersedia meminjamkan kliping surat kabarnya sehingga sangat membantu penulis mengumpulkan data.

### **Daftar Pustaka**

- Ardianto, Elvinaro, 2004, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Simbiosis, Bandung .
- Densen, Norman & Yvonna S. Lincoln, 2005, *Qualitatif Research (third edition)*, Sage Publication.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, LkiS Yogyakarta.
- Hamad, Ibnu, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Jakarta.
- Kovach, Bill & Tom Rosenstiel, 2001, *The Elements of Journalism*, Crown Publishers, New York.
- Mc, Quail, Dennis, 2005, *Mass Communication Theories*, Sage Publication.
- Sobur, Alex, 2001 *Analisis Teks Media*, Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Sunarto, 2010, Stereotipasi Peran gender Wanita dalam Program Televisi Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 8 No.3 September-Desember 2010 Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN Veteran Yogyakarta.